

Rilis Pers Diskusi Publik INDEF
Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19
Kamis, 17 Desember 2020

Diskusi Publik Indef bertajuk *Masa Depan Sawit Indonesia Di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19* memiliki tujuan utama memperluas pemahaman tentang perkembangan komoditas minyak sawit di Indonesia dalam menghadapi kebijakan restriksi komoditas ini di Uni Eropa. Secara khusus diskusi publik ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran tentang tindakan kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa,
- b. mengetahui perkembangan dan kebijakan yang telah dilakukan danantisipasi langkah Uni Eropa untuk tahun-tahun mendatang, dan
- c. mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggapi restriksi perdagangan yang dilakukan Uni Eropa.

1. Produksi kelapa sawit Indonesia semakin meningkat.

- Luas kebun kelapa sawit dan produksi minyak sawit Indonesia dalam satu dekade terakhir meningkat masing-masing 1,7 kali lipat dan 2,2 kali lipat. Pada tahun 2010, luas kebun kelapa sawit seluas 8,39 juta hektar. Pada tahun 2020*, angkanya meningkat menjadi 16 juta hektar. Produksi kelapa sawit meningkat dari angka 21,96 juta ton di tahun 2010 menjadi 49,12 juta ton di 2020¹.
- Perkebunan rakyat menguasai 41 persen (6,09 juta hektar) luas lahan perkebunan kelapa sawit di tahun 2020*. Pada tahun yang sama, perkebunan swasta menguasai 55 persen (8,26 juta hektar) luas lahan dan 4 persen (643 ribu hektar) sisanya dikelola oleh perkebunan negara. Sedangkan dalam hal produksi, perkebunan rakyat memproduksi 35 persen (17,37 juta ton) produksi kelapa sawit, perkebunan swasta memproduksi 60 persen (29,27 juta ton) kelapa sawit dan perkebunan negara 5 persen (2,4 juta ton).

2. Uni Eropa merupakan pasar besar bagi komoditas sawit Indonesia.

- EU merupakan pasar penting dan stabil bagi ekspor sawit Indonesia sampai sekarang walau ada tren yang menurun. Hingga Oktober 2020, pasar Uni Eropa menyerap 24 persen (1,40 miliar US dollar) dari total ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil/cpo*) Indonesia. Total ekspor minyak sawit mentah Indonesia hingga Oktober 2020 mencapai 5,85 miliar US dollar.
- Hal ini terlepas dari berbagai hambatan yang diterapkan oleh EU. Namun demikian adanya RED II, tuduhan subsidi dan dumping telah memberikan

*) Proyeksi Kementan

¹ Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2018-2020, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 2019.

dampak bagi ekspor bio fuel sawit, walau dikompensasi dengan ekspor untuk keperluan pangan dan industri. Tidak hanya produk minyak sawit mentah, Uni Eropa menjadi pasar bagi produk inti minyak kelapa sawit. Uni Eropa juga menjadi pasar bagi produk sawit lainnya. Di tahun 2020, ekspor minyak inti kelapa sawit (*crude oil of palm kernel*) ke negara Uni Eropa memiliki kontribusi sebesar 33,9 persen dari total ekspor produk tersebut atau sebesar 72 juta US dollar.

3. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja

- Perkebunan kelapa sawit membuka lapangan pekerjaan bagi 2,68 juta keluarga pekebun kelapa sawit dan 4,45 juta individu di tahun 2020. Angka ini setara dengan 11,65 persen tenaga kerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Agustus 2020 yang mencapai 38,2 juta orang² atau sekitar 3,46 persen dari total penduduk yang bekerja di Agustus 2020 yang mencapai 128,4 juta orang.
- Larangan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya ke Uni Eropa jelas akan berdampak pada 4,45 juta pekerja dan 2,68 juta keluarga petani yang mengandalkan hidup dari kelapa sawit. Angka tersebut adalah angka tenaga kerja yang terserap langsung, bukan tenaga kerja yang terserap secara tidak langsung dari aktivitas perkebunan kelapa sawit.

4. Kebijakan Perdagangan Non-Tarif Uni Eropa terhadap Produk Kelapa Sawit Indonesia harus disikapi dengan serius.

- Berbagai restriksi diberlakukan di negara-negara Eropa (EU) untuk menghambat perdagangan sawit secara *free* dan *fair*. Beberapa kebijakan dan regulasi yang sedang dan akan diterapkan antara lain sebagai berikut: a. RED II dan rencana revisi RED II yang akan membatasi dan kemudian menghapuskan penggunaan *biofuel based palm oil* sebagai *renewable energy* di EU; b. EU Green Deal Parlemen Eropa untuk membatasi minyak sawit dan komoditas penting lainnya mencakup "*The New EU Forest Strategy: The Way Forward*": "*EU Biodiversity Strategy*": "*EU Farm to Fork Strategy*" dan : "*European Parliament Climate Law "Framework for achieving climate neutrality"*" dengan penerapan *EU Due Dilligence*; dan c. Isu 3MCPDE & GE.
- Selain itu beberapa negara seperti Inggris juga akan menerapkan *UK Due Dilligence* dimana *first legislation* sudah dikeluarkan dan sekarang *second legislation* sedang dalam pembahasan. *First legislation* dari *UK Due Dilligence* dimana sistem berbasis legalitas berarti ISPO diakui dan memberi Indonesia preseden yang sangat kuat dalam negosiasi dengan UE & lainnya, namun *second*

² ibid

legislation masih harus diperjuangkan agar *in favour* minyak sawit dan komoditas perkebunan lainnya.

- Referendum Swiss dimana Indonesia-EFTA CEPA akan diputuskan oleh rakyat Swiss pada tanggal 7 Maret 2021.
- Dalam jangka panjang, kebijakan Uni Eropa akan mempengaruhi komponen ekspor sawit untuk biodiesel, tidak hanya untuk Uni Eropa namun juga pasar di negara-negara lainnya.
- Label *free palm oil* masih gencar dilakukan perusahaan di negara-negara Uni Eropa. Kini semakin banyak produk yang memberikan *free palm oil* di negara-negara EU. Penggunaan label *palm oil free* dapat semakin menguat karena menysasar konsumen Uni Eropa yang memiliki persepsi buruk terhadap produk kelapa sawit. Persepsi tersebut mencakup :
 - a. Persepsi minyak sawit *less healthy* karena standar batas aman 3-MCPD pada minyak sawit sebesar 2.5 ppm sementara pada minyak nabati lain sebesar 1,25 ppm;
 - b. Persepsi minyak sawit tidak lestari karena menjadi penyebab utama deforestasi serta tidak ramah lingkungan,
 - c. Persepsi bahwa industri minyak kelapa sawit tidak menjunjung HAM.

5. Formulasi Peta Jalan Merespon Kebijakan Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit Indonesia

Dengan berbagai permasalahan dan isu seputar kebijakan non-tarif Uni Eropa terhadap Produk Kelapa Sawit Indonesia, INDEF merekomendasikan terobosan untuk mengurangi dampak kebijakan non-tarif Uni Eropa terhadap Produk Sawit Indonesia yakni sebagai berikut.

1. Memperkuat ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) sehingga lebih kredibel dan bisa diterima oleh dunia internasional serta implementasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*.
2. Mempromosikan secara lebih proaktif langkah-langkah Indonesia dalam memastikan *sustainability* minyak sawit melalui moratorium, Rencana Aksi Nasional (RAN) FOKSBI, ISPO dan RSPO.
3. Membangun dan memperkuat lebih diplomasi melalui ASEAN dan EU dimana berdasarkan *ASEAN-EU Ministerial Meeting* baru-baru ini telah disepakati pentingnya SDGs sebagai parameter *sustainability* untuk minyak nabati secara keseluruhan dan dampak lingkungan harus didekati secara lebih komprehensif dan holistik (tidak terbatas pada isu deforestasi).
4. Memasifkan kampanye positif kelapa sawit di Uni Eropa melalui KBRI/Konjen, mahasiswa Indonesia dan diaspora yang berada di Uni Eropa.

5. Mempersiapkan langkah-langkah retaliasi terhadap produk-produk impor dari Uni Eropa (jika suatu saat diperlukan) dimana produk tersebut tersedia substitusinya di negara lain.
6. Meningkatkan kolaborasi riset ilmiah dengan ilmuwan luar negeri terkait manfaat kelapa sawit dalam rangka menangkal kampanye hitam yang berbasis sains.
7. Aktif mencari pasar baru bagi produk kelapa sawit dan turunannya, baik di domestik maupun luar negeri selain Uni Eropa.
8. Mempersiapkan langkah antisipatif bagi pekerja dan keluarga petani yang terdampak sebagai akibat kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa
9. Meningkatkan pengembangan sisi *off farm* kelapa sawit, baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik, agar nilai tambah sektor kelapa sawit domestik meningkat.
10. Mendorong kebijakan lingkungan hidup Uni Eropa tidak diskriminatif dan berdasar pada hukum internasional yang berlaku.

INDEF

Email : indef@indef.or.id
Telp : +62 21 7901001
Fax : +62 21 79194018
WA : +62 813-8047-7878
IG : indef_official
twitter : @IndefEconomics
Web : www.indef.or.id